

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK
DAERAH KOTA MANADO**

**Oleh:
Natalia Deisi Lumintang
NIM: 11 042 039**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2015**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK
DAERAH KOTA MANADO**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Terapan
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

**Oleh:
Natalia Deisi Lumintang
NIM: 11 042 039**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2015**

ABSTRAK

Lumintang D. Natalia, 2015. **Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPK-BMD Pemerintah kota Manado.** Tugas akhir, Jurusan Akuntansi Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado. Pembimbing I : Joseph N. Tangon, SE,MSA.Ak.CA. Pembimbing II Jacqualine G. Wenas, SE.

SIMDA Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Badan pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) pemerintah kota Manado, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh BPK-BMD kota Manado sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari pegawai BPK-BMD kota Manado yaitu pegawai bagian perbendaharaan, pegawai bagian penganggaran, bagian akuntansi dan pelaporan dan Kepala badan.

Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai BPK-BMD Manado serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai BPK-BMD Manado sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, Sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan

ABSTRACT

Lumintang D. Natalia, 2015. **The Analysis of Implementation Financial Management Information Systems Area at BPK-BMD Manado City Government.** Thesis. Accounting Department Manado State Polytechnic. Research Advisor : Joseph N. Tangon, SE,MSA.Ak.CA. Jacqueline G. Wenas, SE

Financial SIMDA is an information system that was built , developed and used to conduct a performance-based budget process. the purpose of the application of the financial SIMDA is to generate financial reports in a timely, complete , accurate , and reliable according to applicable regulations

This research aims to obtain an overview of the implementation of the financial SIMDA and determine the factors and values held by the CPC supporters manado city so as to apply financial SIMDA and quality of information resulting from its application. The respondents in this study as many as four people consisting of BPK-BMD employees manado city such as treasury division, budgeting division, accounting and reporting division, and head of agency.

Data collection techniques are interviews with the respondents using an interview guide, direct observation of the activities of the employees, documentation of the study related documents . Interviews and data collected were analyzed with descriptive methods.

The results of this study showed that in general the employee BPK-BMD Manado already understand the meaning of SIMDA finance and description of implementation relating to input and output data , factors which are owned to support the implementation of SIMDA finance is communication , human resources , attitudes / disposition and bureaucratic structure .

Keyword : Financial Management Information Systems Area (SIMDA)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BIOGRAFI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen	6
2.2 Manfaat dan Kualitas Informasi	6
2.3 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	8
2.4 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	10
2.5 Keunggulan dan Manfaat SIMDA	13
2.6 Fokus Penelitian	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Lokasi Penelitian	17
3.3 Sumber Data	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Teknik Analisis Data	19
3.6 Pengecekan Validitas Temuan	20

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil BPK-BMD Kota Manado	22
1. Visi Dan Misi	22
2. Tugas Pokok Dan Fungsi	22
3. Struktur Organisasi	28
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	29
1. Proses Simda Keuangan	35
2. Pemahaman makna SIMDA Keuangan	42
3. Faktor-Faktor Pendukung Yang Dimiliki BPK-BMD Manado dalam Penerapan SIMDA Keuangan	48
4. Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Penerapan SIMDA Keuangan	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan Negara dengan mengeluarkan undang-undang bidang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya Laporan Keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan

dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik; (i) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, (ii) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (iv) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut:

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik”

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan. SIMDA keuangan dirancang oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu

sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja.

P. siagian (Ridwan, 2009) menyatakan bahwa.“pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi merupakan kemewahan akan tetapi sudah merupakan keharusan. Efisien, efektifitas, dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan baik pada tingkat individu, kelompok maupun pada tingkat organisasi atau perusahaan sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi tersebut.”

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat Pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA keuangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan daerah. SIMDA keuangan merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Dalam rangka mengemban amanat PP Nomor 56 tahun 2005 untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan SIMDA Keuangan, Pemerintah kota Manado yang telah menerapkan SIMDA Keuangan secara menyeluruh. Tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya & penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya.

Tujuan dari penerapan SIMDA keuangan ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya & penyelenggaraan

pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Sehingga dengan begitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan dengan diberlakukannya SIMDA Keuangan ini apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan SIMDA keuangan khususnya tentang bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan, faktor-faktor pendukung apa saja yang dimiliki Pemkot Manado sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan serta Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan Tahun 2014 maka peneliti mengambil judul “Analisis penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)Keuangan pada Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah (BPK-BMD)pemerintah kota manado”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA keuangan dan gambaran pelaksanaan SIMDA Keuangan pada Pemkot Manado ?
2. Apa saja Faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemkot Manado sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan ?
3. Bagaimana Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDAkeuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah kota Manado.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai.

1. Mengetahui pemahaman pegawai tentang SIMDA keuangan dan gambaran pelaksanaan SIMDA Keuangan Pada Pemkot Manado ?
2. Mengetahui Apa saja Faktor-faktor pendukung yang dimiliki Pemkot Manado sehingga mampu menerapkan SIMDA Keuangan ?
3. Mengetahui Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah kota Manado?

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi peneliti mengenai penerapan SIMDA Keuangan.
2. Pemerintah daerah :
 - a. Sebagai bahan Evaluasi kualitas Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA keuangan.
 - b. Sebagai referensi mengenai penerapan SIMDA keuangan
3. Akademisi dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen dibentuk oleh tiga kata, yaitu sistem, informasi dan manajemen. Menurut Sutanta (2003:3) sistem adalah “sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling kerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”. Sutanto (2007:46) mendefinisikan informasi sebagai “hasil pengelolaan data yang memberikan arti dan manfaat”. manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007:58) sebagai “suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”. Menurut Mcleod (2010:11) “sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Menurut Kumorotomo (2004:7) “sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi”. Lebih lanjut Kumorotomo (2004: 9) menjelaskan bahwa “unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output)”.

2.2 Manfaat dan Kualitas Informasi

1. Manfaat Informasi

Informasi dikatakan bernilai apabila dapat memberikan manfaat kepada para pengguna. Adapun manfaat dari informasi itu sendiri menurut Sutanta (2003:11) adalah :

- a. Menambah pengetahuan

Adanya informasi akan menambah pengetahuan bagi penerima yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

b. Mengurangi ketidakpastian pemakai informasi

Informasi akan mengurangi ketidakpastian karena apa yang akan terjadi dapat diketahui sebelumnya.

c. Mengurangi risiko kegagalan

Adanya informasi dapat mengurangi risiko kegagalan karena apa yang akan terjadi dapat diantisipasi dengan baik, sehingga kemungkinan terjadi kegagalan akan dapat dikurangi dengan pengambilan keputusan yang tepat.

d. Mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan

Informasi akan menghasilkan keputusan yang terarah, sehingga mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan.

e. Memberikan standar, aturan, ukuran dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran berdasarkan informasi yang diperoleh.

2. Kualitas Informasi

Nilai informasi ditentukan oleh banyak hal, di antaranya adalah dengan melihat kualitas informasi yang dihasilkan. Menurut Ahituv dalam Jogiyanto(2007:16) bahwa mengukur kualitas informasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam karakteristik, yaitu :

- a. Akurasi (accuracy)
- b. Ketepatan waktu (timelines)
- c. Relevan (relevance)
- d. Agregasi (agregacy)
- e. Pemformatan (formatting)

Swanson dalam Jogiyanto (2007:16) mengukur kualitas informasi dengan pengukuran keunikan (uniqueness), ketepatan (conciseness), kejelasan (clarity) dan keterbacaan (read ability).

2.3 Proses Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sebuah sistem membutuhkan sebuah proses untuk menjalankannya, begitu pula Sistem Informasi Manajemen, Berikut bagaimana proses SIM dilakukan.

Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas :

1. Perencanaan, formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan, dan manajer serta pekerja harus memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan, disebut kebutuhan.
3. Pengambilan keputusan, proses pemilihan diantara berbagai alternative disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih diantara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat dipilih.

2.4 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasikomputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintahdaerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dankelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan disetiap SKPD dengan sistem database terintegrasi, sehingga outputnya dapatdipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilankeputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukanmonitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satuupaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat,lengkap, akurat, dan terpadu, untukmenunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

1. Tujuan dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Tujuan diterapkannya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) adalah :

- a. Sebagai tempat tukar menukar informasi bagi setiap unit kerja samapenerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcam bagi unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- c. Sebagai salah satu media kontrol bagi realisasi kegiatan, baik capaianfisik maupun penyerapan dananya;
- d. Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government;dan
- e. Sebagai sarana untuk pelaksanaan good governement.Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dengan menggunakansistem aplikasi SIMDA keuangan daerah terintegrasi (BPKP, 2008) adalahsebagai berikut :
 - 1) Database terpadu, tidak perlu input berulang-ulang data yang sama;
 - 2) Data yang sama akan tercek dan recek secara otomatis (validasi dataterjamin); dan
 - 3) Fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhandimana:
 - a) Output dapat disesuaikan menurut perundang-undangan yangberlaku, dan
 - b) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil keputusan/ kebijakan.

2. Klasifikasi SIMDA

SIMDA dapat diklasifikasikan dalam tiga tingkatan (BPKP, 2008), yaitu :

- a. Sistem informasi eksekutif sebagai pendukung pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan;
- b. Sistem informasi fungsional bagi para pimpinan dinas/badan/lembaga sebagai pendukung informasi strategis pimpinan daerah; dan
- c. Sistem informasi operasional sebagai penunjang tugas pokok masing-masing dinas/ lembaga.

3. Unsur SIMDA

Kerangka arsitektur SIMDA terdiri dari empat lapis struktur (BPKP,2008), yaitu.

- a. Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi, lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik;
- b. Portal, pelayanan publik, situs web pemerintah pada internet penyedia layanan public tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait;
- c. Organisasi pengolahan dan pengelolaan informasi organisasi pendukung yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik; dan
- d. Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi

2.5 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Program aplikasi komputer SIMDA keuangan adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemda dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

1. Perkembangan SIMDA Keuangan

SIMDA Keuangan mengalami empat tahapan perubahan, yaitu.

a. SIMDA Ver. 1.0

Aplikasi SIMDA Ver. 1.0 ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang pertama kali dikembangkan oleh BPKP, yaitu pada tahun 2003. Aplikasi ini dikembangkan mengacu pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan

anggaranpendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangandaerah dan penyusunan perhitungan anggaran dan belanja daerah, dandraft sistem akuntansi pemerintah yang sedang tahap pengembangansaait itu. Sistem ini dipakai sampai dengan tahun 2004 dan berhasildiaplikasikan pada sembilan pemerintahan daerah.

b. SIMDA Ver. 2.0

Aplikasi SIMDA Ver. 2.0 merupakan penyempurnaan dari versisebelumnya akibat adanya perubahan dan penambahan acuan peraturanyang mendasarinya, yaitu Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, PP No. 24Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, dan PP No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulaiaplikasikan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang.Sistem iniberhasil diimplementasikan di 28 pemerintahan daerah.

c. SIMDA Ver. 2.1

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling updateyang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahanacuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu PP No. 24 Tahun2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006 mengenai PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistemini mulai mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarangmasih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya denganadanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerahmelalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atasPermendagri No. 13 Tahun 2006.

d. SIMDA Ver 2.7

Dasar pengembangan aplikasi SIMDA Keungan Ver 2.7 berbasis accrual antara lain, PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintahan PMK 238, PMK 05 2011 tentang pusat.Permendagri no 64

tahun 2013 tentang pedoman penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual pada pemda output aplikasi antara lain APBD beserta perubahannya, SPM,SP2D,Jurnal transaksi accrual,Buku besar, Neraca,laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL,Laporan Arus Kas, serta Perda pertanggungjawaban. mekanisme dan output penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban berpedoman pada permendagri 13 tahun 2006 No 59 tahun 2007, No 55, No 21 dan seterusnya proses dan output akuntansi berpedoman pada PP 71 Tahun 2010, PMK 238 tahun 2011 dan permendagri No 64 tahun 2013 aplikasi ini didukung dengan pedoman penyusunan perkada kebijakan akuntansi dan sistim akuntansi pemda berbasis aplikasi SIMDA accrual.

2. Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah :

- a. Penganggaran
 - 1) Rencana Kerja Anggaran (RKA);
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - 2) Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. Penatausahaan
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 4) Surat Tanda Setoran (STS);
 - 5) Register; dan
 - 6) Surat pengendalian lainnya.
- c. Akuntansi dan Pelaporan
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2) Laporan Perubahan SAL
 - 3) Laporan Operasional (LO)
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5) Neraca

- 6) Laporan Arus kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

3. Fungsi Program Aplikasi SIMDA

Fungsi utama pengimplementasian SIMDA adalah :

- a. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban);
- b. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat;
- c. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya;
- d. Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan; dan
- e. Mempermudah proses audit bagi Auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi Electronic Data Processing (EDP) audit.

2.6 Keunggulan dan Manfaat SIMDA

Keunggulan atau nilai tambah yang ditawarkan oleh SIMDA Keuangan adalah:

1. Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan;
2. Berbasis windows;
3. Validasi Inputan data lebih terjamin;
4. Terdapat menu otoritas dan unit otoritas;
5. Memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi; dan
6. Memfasilitasi akuntansi pengguna anggaran.

Selain manfaat di bidang pengelolaan keuangan daerah, berikut adalah manfaat lain yang terintegrasi dalam pemanfaatan SIMDA, diantaranya:

1. Sesuai Peraturan

Dengan menerapkan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sebuah sistem informasi pengelolaan keuangan, pemerintah daerah secara otomatis telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan

peraturan pengelolaan keuangan daerah karena aplikasi SIMDA Keuangan dikembangkan atas dasar kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

2. Kesiambungan Maintenance

Dengan lokasi BPKP yang ada di setiap ibukota provinsi, maka pemeliharaan sistem dapat dilakukan secara berkesinambungan dan optimal.

3. Transfer of Knowledge

Poin yang paling penting dari penerapan sistem ini adalah adanya transfer pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah bagi aparat daerah setempat, tidak hanya masalah operasional sistem saja. Selain itu, proses asistensi yang dilaksanakan oleh BPKP dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIMDA di suatu daerah diorientasikan “satu kali untuk selamanya.”

4. Terintegrasi

SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjournalannya secara otomatis. Sehingga, setiap transaksi keuangan yang terjadi, dapat langsung dilihat jurnal atas transaksi tersebut hingga pelaporannya pada waktu yang bersamaan.

5. Pembiayaan Penerapan SIMDA

Biaya yang dikenakan terhadap atas program aplikasi SIMDA ini dapat dikatakan gratis atau tanpa biaya. Jika dibandingkan dengan program aplikasi lainnya, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat mencapai ratusan juta hingga milyaran, tergantung pada jumlah komputer pengguna yang ingin dipasang program tersebut. Hal inilah yang membuat SIMDA menjadi pilihan utama berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk dijadikan sebagai basis sistem informasi keuangannya. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk penerapan SIMDA, hanya dibutuhkan untuk alokasi tenaga asistensi dan proses-proses pelatihan yang nantinya bermanfaat bagi

pemerintah daerah itu sendiri. Besaran jumlah dan yang dibutuhkan untuk proses asistensi implementasi ataupun pendidikan dan pelatihan SIMDA ini, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing pemerintah daerah. Artinya, setiap pemerintah daerah tidak akan dibebankan biaya yang melampaui kemampuan keuangannya.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam proses implementasi SIMDA, dalam kaitannya dengan ketersediaan SDM pendukung program aplikasi tersebut berjalan lancar, diperlukan adanya penyediaan kebutuhan SDM, baik dari pihak BPKP maupun pihak pemerintah daerah sebagai counterpart. BPKP menyediakan satu tim asistensi SIMDA, yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggungjawab, pengendali teknis, ketua tim dan beberapa anggota tim (tergantung pada besar kecilnya pemerintah daerah yang ditangani). Sementara pihak pemerintah daerah mengarahkan SDM dengan level yang sama, ditambah tenaga administrator database, asisten administrator dan timnya, serta seluruh pengguna SIMDA (khususnya bendahara) pada level Satker. Khusus untuk administrator database SIMDA, harus memiliki prasyarat antara lain, mahir dalam menggunakan komputer, program database, memahami pentingnya pengamanan data dan antusiasme tinggi untuk mempelajari sistem informasi teknologi. Proses transfer knowledge dilakukan dengan metode yang berbeda bagi masing-masing tipe counterpart. Metode tandem atau pendampingan digunakan untuk mendidik dan melatih administrator database. Metode ini adalah suatu cara mengenali secara dalam dari business process program aplikasi SIMDA bagi administrator dengan cara menerima dan melaksanakan instruksi dari personil tim asistensi yang ditunjuk, dan berdiskusi interaktif jika terdapat permasalahan, khususnya troubleshooting. Metode Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SIMDA Keuangan merupakan metode penyaluran pengetahuan tentang penggunaan SIMDA Keuangan bagi bendahara dan pengguna dari level Satuan Kerja (Satker). Diklat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.7 Fokus Penelitian

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah yaitu untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya SIMDA penyajian informasi sudah sesuai dengan ketentuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana penulis mengumpulkan informasi dari fakta-fakta yang terjadi diperusahaan kemudian mengolah menjadi kalimat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan pengelola keuangan dan barang milik daerah pemerintah kota manado yang merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan SIMDA di provinsi Sulawesi utara. BPK-BMD Pemerintah daerah kota manado berlokasi di Jl. Balai kota Nomor 1 Manado 95124 dan penelitian ini dilakukan pada 24 february sampai 22 mei 2015.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada BPK-BMD kota manado serta dokumen /arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *job description*. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland (1984) adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada informan kunci.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan, literature, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informan kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah penanggungjawab SIMDA keuangan bagian penatausahaan, penanggung jawab SIMDA keuangan bagian anggaran, penanggungjawab SIMDA keuangan bagian akuntansi dan pelaporan, dan aktor-aktor lainnya yang memiliki wewenang untuk mengoperasikan SIMDA keuangan.

2. Observasi

Observasi digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses akuntansi serta kendala-kendala dalam melaksanakan penerapan SIMDA Keuangan dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara.

Materi yang diperlukan dalam penelitian penerapan SIMDA keuangan pada BPK-BMD kota manado adalah :

- a. Data mengenai profil BPK-BMD kota manado mencakup : visi, misi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta gambaran penerapan SIMDA keuangan pada BPK-BMD kota manado.

- b. Data informasi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA keuangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam penelitian sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan SIMDA. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah :

1. Data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diorganisir kesamaan dan perbedaannya sesuai dengan pertanyaan penelitian,
2. Data yang sudah diorganisir ditentukan temanya,
3. Mencari keterkaitan antara tema,
4. Interpretasi atas semua temuan sesuai dengan keterkaitan antar tema dengan menggunakan teori yang relevan.

3.6 Pengecekan Validitas Temuan

Validasi data dilakukan dengan menggunakan metode Triangulasi antara sumber data dan data itu sendiri.

1. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggunakan informan yang berbeda untuk melakukan cross check dan penelusuran data sekunder.
2. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi, atas kesalahan dan menghindari subjektivitas sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto. 2007. Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta:Andi.
- Kumorotomo. 2004. Sistem Informasi Sektor publik.Yogyakarta
- Launching SIMDA 2.7 Accrual (www.youtube.com)
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi.
- Mcleod, Raymod. 2010. Sistem Informasi Manajemen.Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Eko. 2007. Sistem Informasi Manajemen.Yogyakarta: Andi.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.2005.Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.2005.Jakarta:IkatanAkuntansi Indonesi.
- Proses SIMDA (<http://herisulistiyonomts142730639.blogspot.com>)
- Proses Sistem Informasi Manajemen (<http://bilalprasetiyo.blogspot.co.id>)

Permendagri 13 tentang Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Keuangan (www.bpkp.go.id)

Satgas Pengembangan SIMDA. 2011. Bimbingan Teknis SIMDA keuangan. Manado: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Satgas Pengembangan SIMDA 2008. SIMDA dan Penerapannya. Manado: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.

Sutanta, Edhy. 2003. Sistem informasi manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutanto, Azhar. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Linggar Jaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2009. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indones